

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Dinamika Pajak Daerah, PDRB, Belanja Daerah, IPM dan TPAK di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi pada tahun 2021-2024

Bagian ini akan menjelaskan tentang analisis deksriptif kuantitatif yaitu untuk menganalisis perkembangan Pajak Daerah, PDRB, Belanja Daerah, IPM dan TPAK pada Kabupaten dan Kota di Provinsi yang dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayanya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Pajak daerah Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah bersama dengan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembiayaan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Untuk lebih jelasnya perkembangan Pajak Daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5. 1 Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2021-2024 (Milliar Rupiah)**

Wilayah	Tahun							Rata- Rata Pajak	Rata-Rata (%)
	2021	2022	(%)	2023	(%)	2024	(%)		
Kerinci	13.133,94	15.503,92	18,05	17.425,64	12,40	17.872,01	2,57	15.983,88	11,01
Merangin	29.071,19	28.572,61	-1,72	30.753,45	7,64	32.240,40	4,84	30.159,41	3,59
Sarolangun	18.942,80	22.426,26	18,39	22.388,82	-0,17	18.762,19	-16,20	20.630,02	0,67
Batang Hari	21.565,02	26.584,63	23,28	42.188,29	58,70	27.980,29	-33,68	29.579,56	16,10
Muaro Jambi	61.336,70	65.410,84	6,65	78.763,25	20,42	85.766,73	8,90	72.819,38	11,99
Tanjung Jabung Timur	19.776,69	23.152,32	17,07	20.165,84	-12,90	23.321,73	15,65	21.604,15	6,61
Tanjung Jabung Barat	31.635,06	33.014,82	4,37	35.446,09	7,37	33.570,22	-5,30	33.416,55	2,15
Tebo	22.540,97	23.340,22	3,55	24.324,46	4,22	25.946,09	6,67	24.037,94	4,81
Bungo	44.859,99	42.661,30	-4,91	43.733,91	2,52	46.721,20	6,83	44.494,10	1,48
Kota Jambi	244.726,97	301.796,80	23,32	325.296,71	7,79	330.056,16	1,47	300.469,16	10,86
Kota Sungai Penuh	8.512,03	8.853,15	4,00	9.125,516	3,08	8.996,61	-1,42	8.871,83	1,89
Rata-Rata	46.918,31	53.756,08	10,19	59.055,63	10,10	59.203,06	-0,88	54.733,27	6,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Melalui Tabel 5.1 rata-rata perkembangan Pajak Daerah di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2021–2024 senilai 6,47 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 10,19 persen, sementara penurunan terendah terjadi pada 2024 sebesar -0,88 persen. Kabupaten Batanghari mencatat rata-rata tertinggi sebesar 16,10 persen, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 mengalami perkembangan tertinggi sebesar 58,70 persen, Ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi atau efisiensi dalam pengumpulan pajak, misalnya pertumbuhan usaha, investasi, atau perbaikan sistem administrasi pajak di Kabupaten Batanghari. Sebaliknya, Kabupaten Sarolangun mencatat rata-rata terendah sebesar 0,67 persen, Hal ini disebabkan pada tahun 2024 pajak daerah mengalami perkembangan terendah sebesar -16,20 persen, Penurunan pajak daerah ini biasanya berdampak negatif pada ekonomi lokal, sehingga pendapatan dari pajak ikut menurun karena aktivitas ekonomi yang melemah, dan ada masalah dalam pengelolaan dan pemungutan pajak.

5.1.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Menurut Bambang dan Aristanti (Fajri, 2018) PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu masyarakat yang tinggal di suatu daerah (*region*). Hal ini berarti PDRB tidak melihat siapa dan darimana unit yang

memproduksi barang atau jasa tersebut asalkan beroperasi di daerah itu, maka hasil produksinya merupakan input dari PDRB daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah satu dari banyaknya penentu utama yang ditetapkan dalam mengukur kondisi perekonomian di sebuah suatu wilayah pada periode. Perubahan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi umumnya merefleksikan dinamika laju perekonomian provinsi tersebut dari waktu ke waktu. PDRB atas dasar harga diberlakukan memperlihatkan total nilai tambah dari barang ataupun jasa yang dihitung didasarkan pada harga yang diberlakukan di tahun pengamatan.

Melalui indikator ini, kita dapat mengidentifikasi potensi ekonomi suatu wilayah sekaligus menelusuri transformasi dan pergeseran struktur ekonominya. Secara garis besar peningkatan nilai PDRB mengindikasikan adanya perkembangan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Sebaliknya, jika pertumbuhan PDRB menurun, hal itu dapat menjadi sinyal adanya hambatan atau perlambatan dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Berikut perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021-2024.

Tabel 5. 2 Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021-2024 (Milliar Rupiah)

Wilayah	Tahun							Rata-Rata PDRB	Rata-Rata (%)
	2021	2022	(%)	2023	(%)	2024	(%)		
Kerinci	11.237,95	12.225,62	8,79	13.405,34	9,65	14.719,25	9,80	12.897,04	9,41
Merangin	17.837,34	20.283,83	13,71	22.524,52	11,05	25.472,37	13,09	21.529,52	12,62
Sarolangun	16.558,99	20.772,44	25,44	21.508,72	3,54	22.701,23	5,54	20.385,35	11,51
Batang Hari	18.809,25	24.304,28	29,21	25.448,61	4,71	26.149,80	2,75	23.677,99	12,22
Muaro Jambi	27.558,33	32.958,02	19,59	35.884,84	8,88	40.475,99	12,79	34.219,30	13,75
Tanjung Jabung Timur	21.783,61	25.606,19	17,55	25.073,11	-2,08	27.296,26	8,87	24.939,79	8,11
Tanjung Jabung Barat	42.080,58	50.081,57	19,01	50.852,27	1,54	55.732,85	9,60	49.686,82	10,05
Tebo	16.949,28	19.698,14	16,22	21.183,49	7,54	23.908,92	12,86	20.434,96	12,21
Bungo	20.082,88	24.897,22	23,97	26.234,77	5,37	27.908,92	6,38	24.780,95	11,91
Kota Jambi	31.918,62	36.183,83	13,36	40.580,62	12,15	43.375,48	6,89	38.014,64	10,80
Kota Sungai Penuh	7.980,85	8.679,09	8,75	9.475,13	9,17	10.280,79	8,50	9.103,97	8,81
Rata-rata	21.163,43	25.062,75	17,78	26.561,04	6,50	28.911,08	8,82	25.424,57	11,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Melalui Tabel 5.2 rata-rata pertumbuhan PDRB di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi sepanjang periode 2021–2024 tercatat senilai 11,04 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2022 senilai 17,78 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2023 dengan angka 6,50 persen. Kabupaten Muaro Jambi mencatat rata-rata pertumbuhan PDRB tertinggi, yaitu 13,75 persen, yang didorong oleh kontribusi signifikan dari sektor kehutanan, pertanian, perikanan, serta sektor pertambangan, penggalian, industri pengolahan, konstruksi, juga perdagangan. Sebaliknya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat pertumbuhan terendah dengan rata-rata senilai 8,11 persen. Perekonomian daerah ini tergolong rendah dikarenakan pada wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh lahan gambut yang menyebabkan produksi di sektor pertanian dan perkebunan tidak bisa diandalkan di wilayah ini. Adapun pada sektor sekunder yang mana perusahaan-perusahaan tidak memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di wilayah ini.

5.1.3 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Belanja Daerah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah. salah satunya dengan anggaran belanja, semakin besar anggaran belanja yang dikeluarkan maka semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh kabupaten/kota dengan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah pusat akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam periode anggaran tertentu digunakan untuk melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu.

Statistik keuangan pemerintah pusat bersumber dari Kementerian Keuangan, sedangkan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik melalui masingmasing kantor gubernur dan bupati/ walikota. Sejak tahun 2000 sektor keuangan negara dihitung berdasarkan tahun kalender yang berakhir pada bulan Desember.

Pada ketentuan UU No.33 Tahun 2004 telah diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan belanja daerah. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Rinciannya bisa dibagi dalam dua bentuk yaitu berdasar sifat dan berdasar fungsinya. Berdasar sifat ekonominya belanja daerah terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Untuk lebih jelasnya perkembangan belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 3 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021-2024 (Milliar Rupiah)

Wilayah	Tahun							Rata-Rata BD	Rata-Rata (%)
	2021	2022	(%)	2023	(%)	2024	(%)		
Kerinci	1.143,50	1.133,29	-0,89	1.193,33	5,30	1.211,17	1,49	1.170,32	1,97
Merangin	1.495,14	1.223,91	-18,14	1.338,01	9,32	1.454,75	8,72	1.377,95	-0,03
Sarolangun	1.093,05	1.177,75	7,74	1.153,64	7,03	1.042,04	-9,67	1.116,62	1,70
Batang Hari	1.254,19	1.323,23	5,50	1.454,43	9,91	1.345,52	-7,49	1.344,34	2,64
Muaro Jambi	1.326,74	1.375,27	3,66	1.455,76	5,85	1.633,64	12,22	1.447,85	7,24
Tanjung Jabung Timur	1.049,20	1.180,07	12,47	1.178,68	-0,12	1.260,05	6,90	1.167,00	6,42
Tanjung Jabung Barat	1.443,08	1.580,80	9,54	3.500,01	121,40	1.720,89	-50,83	2.061,20	26,70
Tebo	1.145,76	1.338,83	16,85	1.223,97	-8,57	1.197,57	-2,16	1.226,53	2,04
Bungo	1.155,17	1.218,26	5,46	1.304,62	7,09	1.327,74	1,77	1.251,45	4,77
Kota Jambi	1.224,42	2.280,49	-6,75	2.353,83	112,00	2.556,01	8,59	2.103,69	37,95
Kota Sungai Penuh	803,62	791,95	18,17	788,70	-0,37	810,40	2,75	798,67	6,85
Rata-rata	1.193,99	1.329,44	4,87	1.540,45	24,44	1.414,53	-2,52	1.369,60	8,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Melalui Tabel 5.3 rata-rata perkembangan Belanja Daerah di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2021–2024 senilai 8,93 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2023 sebesar 24,44 persen, sementara penurunan terendah terjadi pada 2024 sebesar -2,52 persen. Kota Jambi mencatat rata-rata tertinggi sebesar 37,95 persen, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 mengalami perkembangan tertinggi sebesar 112,00 persen. Anggaran ini naik cukup tinggi dikarenakan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan untuk pengendalian pandemi Covid-19, kabupaten lainnya di Provinsi Jambi juga menganggarkan belanja daerah cukup tinggi pada tahun 2023 tersebut.

Sebaliknya, Kabupaten Merangin mencatat rata-rata terendah sebesar -0,03 persen, Hal ini disebabkan pada tahun 2022 belanja daerah mengalami perkembangan terendah sebesar -18,14 persen, dikarenakan beberapa faktor yang berkaitan dengan situasi dan kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah. Faktor utama yang mempengaruhi adalah pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Dampak pandemi tersebut mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pendapatan daerah dan belanja daerah.

5.1.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

UNDP pada publikasinya edisi pertama tahun 1990) di halaman pembuka secara jelas menjelaskan bahwa arti penting pembangunan yang berpusat manusia dimana manusia adalah tujuan akhir, bukan sebagai alat pembangunan seperti halnya konsep Sumber Daya Manusia dimana manusia adalah alat untuk mencapai kesejahteraan pembangunan dan ekonomi.

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Untuk lebih jelasnya perkembangan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 4 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021-2024 (indeks)

Wilayah	Tahun				Rata – Rata
	2021	2022	2023	2024	
Kerinci	72,72	73,24	73,77	74,33	73,52
Perkembangan %		0,52	0,53	0,56	0,54
Merangin	70,55	70,98	71,81	72,65	71,50
Perkembangan %		0,43	0,83	0,84	0,70
Sarolangun	72,02	72,66	73,05	73,76	72,87
Perkembangan %		0,64	0,39	0,71	0,58
Batanghari	71,61	71,99	72,50	73,12	72,31
Perkembangan %		0,83	0,51	0,62	0,65
Muaro Jambi	70,79	71,41	72,26	73,11	71,89
Perkembangan %		0,62	0,85	0,85	0,77
Tanjung Jabung Timur	68,09	68,96	69,85	70,77	69,42
Perkembangan %		0,87	0,89	0,92	0,89
Tanjung Jabung Barat	70,26	70,88	71,44	72,01	71,15
Perkembangan %		0,62	0,56	0,57	0,58
Tebo	70,73	71,14	71,99	72,67	71,63
Perkembangan %		0,41	0,85	0,68	0,65
Bungo	72,70	73,08	73,57	74,44	73,45
Perkembangan %		0,38	0,49	0,87	0,58
Kota Jambi	79,94	80,38	80,93	81,77	80,76
Perkembangan %		0,44	0,55	0,84	0,61
Kota Sungai Penuh	76,30	76,75	77,20	77,93	77,05
Perkembangan %		0,45	0,45	0,73	0,54
Rata – Rata IPM	72,34	72,86	73,49	74,23	73,23
Rata – Rata %		0,56	0,63	0,74	0,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Melalui Tabel 5.4 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2021–2024. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Kabupaten Kerinci

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kerinci pada tahun 2021-2024 sebesar 73,52. IPM Kerinci meningkat dari 72,72 pada 2021

menjadi 73,24 pada tahun 2022 naik 0,52 poin, hal ini di dorong oleh peningkatan akses pendidikan dan layanan dasar. Tahun 2023 naik 0,53 poin menjadi 73,77 hal ini mencerminkan tren stabilitas pembangunan. Kemudian tahun 2024 naik 0,56 poin menjadi 74,33 hal ini memperkuat peran pembangunan pendidikan dan daya beli masyarakat. Tidak di temukan penurunan, menunjukkan stabilitas pembangunan manusia.

2. Kabupaten Merangin

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Merangin pada tahun 2021-2024 sebesar 71,50. IPM Merangin meningkat dari 70,55 pada 2021 menjadi 70,98 pada tahun 2022 naik 0,43 poin, hal ini di menunjukkan perbaikan signifikan di bidang kesehatan dan ekonomi lokal. Tahun 2023 naik 0,83 poin menjadi 71,81 hal ini mencerminkan tren stabilitas pembangunan. Kemudian tahun 2024 naik 0,84 poin menjadi 72,65 hal ini mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi yang cepat.

3. Kabupaten Sarolangun

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sarolangun pada tahun 2021-2024 sebesar 72,87. IPM Sarolangum meningkat dari 72,02 pada 2021 menjadi 72,66 pada tahun 2022 naik 0,64 poin, hal ini mencerminkan peningkatan layanan dasar. Tahun 2023 naik 0,39 poin menjadi 73,05 hal ini mencerminkan tren stabilitas pembangunan. Kemudian tahun 2024 naik 0,71 poin menjadi 73,76 hal ini mencerminkan keberhasilan pemulihan dan distribusi layanan publik yang lebih merata.

4. Kabupaten Batanghari

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Batanghari pada tahun 2021-2024 sebesar 72,31. IPM Batanghari meningkat dari 71,61 pada 2021 menjadi 71,99 pada tahun 2022 naik 0,38 poin, hal ini mencerminkan peningkatan layanan dasar. Tahun 2023 naik 0,51 poin menjadi 72,50 hal ini mencerminkan tren stabilitas pembangunan. Kemudian tahun 2024 naik

0,62 poin menjadi 73,12 hal ini mencerminkan keberhasilan pemulihan dan distribusi layanan publik yang lebih merata.

5. Kabupaten Muaro Jambi

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2021-2024 sebesar 71,89. IPM Muaro Jambi meningkat dari 70,79 pada 2021 menjadi 71,41 pada tahun 2022 naik 0,62 poin, hal ini menandakan program pemerataan pendidikan mulai efektif. Tahun 2023 naik 0,85 poin menjadi 72,26 hal ini didorong oleh meningkatnya partisipasi sekolah dan penurunan angka kemiskinan. Kemudian tahun 2024 naik 0,85 poin menjadi 73,11 hal ini mencerminkan keberhasilan pemulihan dan distribusi layanan publik yang lebih merata.

6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021-2024 sebesar 69,42. IPM Tanjung Jabung Timur meningkat dari 68,09 pada 2021 menjadi 68,96 pada tahun 2022 naik 0,87 poin, hal ini menandakan program pemerataan pendidikan mulai efektif. Tahun 2023 naik 0,89 poin menjadi 69,85 hal ini didorong oleh meningkatnya partisipasi sekolah dan penurunan angka kemiskinan. Kemudian tahun 2024 naik 0,92 poin menjadi 70,77 hal ini mencerminkan keberhasilan pemulihan dan distribusi layanan publik yang lebih merata.

7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021-2024 sebesar 71,15. IPM Tanjung Jabung Barat meningkat dari 70,26 pada 2021 menjadi 70,88 pada tahun 2022 naik 0,62 poin, hal ini didukung perbaikan gizi dan pengurangan stunting. Tahun 2023 naik 0,56 poin menjadi 71,44 hal ini didorong oleh meningkatnya partisipasi sekolah dan penurunan angka kemiskinan. Kemudian tahun 2024 naik 0,57 poin menjadi 72,01 hal ini didukung oleh pemulihan pendapatan, percepatan vaksinasi, dan perbaikan layanan sekolah.

8. Kabupaten Tebo

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tebo pada tahun 2021-2024 sebesar 71,63. IPM Tebo meningkat dari 70,73 pada 2021 menjadi 71,14 pada tahun 2022 naik 0,41 poin, hal ini mencerminkan peningkatan layanan dasar. Tahun 2023 naik 0,85 poin menjadi 71,99 hal ini mencerminkan tren stabilitas pembangunan. Kemudian tahun 2024 naik 0,68 poin menjadi 72,67 hal ini mencerminkan keberhasilan pemulihan dan distribusi layanan publik yang lebih merata.

9. Kabupaten Bungo

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bungo pada tahun 2021-2024 sebesar 73,45. IPM Bungo meningkat dari 72,70 pada 2021 menjadi 73,08 pada tahun 2022 naik 0,38 poin, hal ini menandakan program pemerataan pendidikan mulai efektif. Tahun 2023 naik 0,49 poin menjadi 73,57 hal ini didorong oleh meningkatnya partisipasi sekolah dan penurunan angka kemiskinan. Kemudian tahun 2024 naik 0,87 poin menjadi 74,44 hal ini mencerminkan keberhasilan pemulihan dan distribusi layanan publik yang lebih merata.

10. Kota Jambi

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi pada tahun 2021-2024 sebesar 80,76. IPM Kota Jambi meningkat dari 79,94 pada 2021 menjadi 80,38 pada tahun 2022 naik 0,44 poin, hal ini berkat pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang dan pariwisata. Tahun 2023 naik 0,55 poin menjadi 80,93 hal ini menandakan bahwa bantuan sosial dan peningkatan pengeluaran publik sangat berdampak pada masyarakat. Kemudian tahun 2024 naik 0,84 poin menjadi 81,77 hal ini didorong oleh penguatan ekonomi lokal, perluasan layanan internet untuk pendidikan, dan investasi di layanan dasar.

11. Kota Sungai Penuh

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kota Sungai Penuh pada tahun 2021-2024 sebesar 77,05. IPM Kota Sungai Penuh meningkat dari 76,30 pada 2021 menjadi 76,75 pada tahun 2022 naik 0,45 poin, hal ini didukung

perbaikan gizi dan pengurangan stunting. Tahun 2023 naik 0,45 poin menjadi 77,20 hal ini didorong oleh meningkatnya partisipasi sekolah dan penurunan angka kemiskinan. Kemudian tahun 2024 naik 0,73 poin menjadi 77,93 hal ini didukung oleh pemulihan pendapatan, percepatan vaksinasi, dan perbaikan layanan sekolah.

Berdasarkan data rata-rata perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2021-2024 sebesar 0,65 poin. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2024 sebesar 0,74 poin, sementara penurunan terendah terjadi pada 2022 sebesar 0,56 poin. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat rata-rata tertinggi sebesar 0,89 poin, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 mengalami perkembangan tertinggi sebesar 0,92 poin, Peningkatan ini disebabkan oleh perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang mendukung peningkatan standar hidup masyarakat. Selain itu, keberhasilan program-program pemerintah yang efektif dalam bidang sosial dan ekonomi juga turut berkontribusi terhadap perkembangan IPM yang positif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebaliknya, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mencatat rata-rata terendah sebesar 0,54 poin, Hal ini disebabkan pada tahun 2022 IPM mengalami perkembangan terendah sebesar 0,52 poin dan 0,45 point, Kondisi tersebut kemungkinan terjadi karena terbatasnya akses dan kualitas pendidikan, kurangnya fasilitas serta layanan kesehatan yang memadai, dan pendapatan masyarakat yang relatif rendah. Selain itu, hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan sosial dan ekonomi juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya perkembangan IPM di Kabupaten Bungo.

5.1.5 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK.

Menurut Todaro dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat tiga komponen penentu utama yaitu: akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumberdaya manusia, pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang, kemajuan teknologi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Partisipasi angkatan kerja juga dapat diukur dengan TPAK yang berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja (dalam hal ini usia 15-64 tahun) yang berpotensi untuk aktif menjadi tenaga kerja di suatu negara. Nilai TPAK yang tinggi menggambarkan tingginya kontribusi penduduk usia kerja yang bekerja atau tidak menganggur. Saat nilai TPAK turun, hal tersebut menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (*labour supply*) semakin sedikit.

Tabel 5. 5 Perkembangan TPAK Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021-2024

Wilayah	Tahun							Rata – Rata TPAK	Rata – Rata (%)
	2021	2022	(%)	2023	(%)	2024	(%)		
Kerinci	70,90	73,53	3,71	71,89	-2,23	77,64	7,99	73,49	3,16
Merangin	69,85	69,50	-0,50	71,17	2,40	74,73	5,00	71,31	2,30
Sarolangun	64,86	66,74	2,90	66,52	-0,33	68,10	2,37	66,56	1,65
Batang Hari	68,81	63,42	-7,83	62,01	-2,22	63,53	2,45	64,44	-2,53
Muaro Jambi	62,78	67,21	7,06	74,38	10,67	70,36	-5,40	68,68	4,11
Tanjung Jabung Timur	71,22	72,85	2,29	67,56	-7,26	65,44	-3,14	69,27	-2,70
Tanjung Jabung Barat	73,89	70,00	-5,26	70,17	0,24	67,81	-3,36	70,47	-2,79
Tebo	70,65	69,02	-2,31	70,13	1,61	69,11	-1,45	69,73	-0,72
Bungo	63,58	67,83	6,68	70,30	3,64	68,10	-3,13	67,45	2,40
Kota Jambi	63,12	64,52	2,22	64,85	0,51	66,40	2,39	64,72	1,71
Kota Sungai Penuh	64,92	63,02	-2,93	68,24	8,28	66,38	-2,72	65,64	0,88
Rata-rata	67,69	67,97	0,55	68,84	1,45	68,87	0,09	68,34	0,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Melalui Tabel 5.5 rata-rata perkembangan TPAK di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2021–2024 senilai 0,70 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2023 sebesar 1,45 persen, sementara penurunan terendah terjadi pada 2024 sebesar 0,09 persen. Kabupaten Kerinci mencatat rata-rata perkembangan tertinggi sebesar 3,16 persen, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 mengalami perkembangan tertinggi sebesar 77,64 persen, Peningkatan yang signifikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan kesempatan kerja, program pelatihan keterampilan, serta aktivitas ekonomi yang semakin berkembang di Kabupaten Kerinci, sehingga mendorong lebih banyak penduduk untuk aktif dalam angkatan kerja.

Sebaliknya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat rata-rata terendah sebesar -2,79 persen, Hal ini disebabkan pada tahun 2022 TPAK mengalami perkembangan terendah sebesar -5,26 persen, Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya kesempatan kerja, lemahnya aktivitas ekonomi, dan hambatan sosial dan ekonomi yang membuat penduduk kurang termotivasi atau tidak mampu berpartisipasi aktif dalam angkatan kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5.2 Pengaruh PDRB terhadap Pajak (*Tax Buoyancy*) dengan kontrol variabel Belanja Daerah, IPM dan TPAK pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

5.2.1 Analisis Data Panel

Dalam melakukan estimasi regresi data panel terlebih dahulu dilakukan pengujian menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan model terbaik Uji pertama yang dilakukan adalah Uji Chow. yang bertujuan untuk menentukan model terbaik antara *Model Common Effect* (CEM) dan *Model Fixed Effect* Berikut ini adalah hasil dari Uji Chow.

1. Uji Chow

Untuk menentukan model mana yang terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan regresi data panel diperoleh hasil uji chow dengan menggunakan *evIEWS 12* sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	82.866946	(10,29)	0.0000
Cross-section Chi-square	149.024610	10	0.0000

Sumber: Eviews 12 (Data diolah), 2025

Berdasarkan uji chow tersebut menunjukkan bahwa diperoleh nilai probability yaitu $0,0000 < 0,10$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik daripada model CEM. Maka model yang dipilih adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

2. Uji Hausman

Dilakukan pengujian ini yaitu untuk menentukan model mana yang terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Berdasarkan regresi data panel diperoleh hasil uji hausman dengan menggunakan evIEWS 12 sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.055100	4	0.0019

Sumber: Eviews 12 (data diolah), 2025

Berdasarkan uji hausman tersebut menunjukkan bahwa diperoleh nilai probability yaitu $0.0019 < 0,10$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik daripada model REM. Maka model yang dipilih adalah model FEM.

5.2.2 Hasil Pengujian Estimasi Metode *Fixed Effect Model* (FEM)

Berdasarkan pengujian regresi data panel dapat disimpulkan bahwa metode regresi terbaik dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Fixed Effect Model* (FEM) dan diperoleh hasil regresi berikut:

Tabel 5. 8 Hasil Regresi Metode *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.08235	10.40765	1.353077	0.1865
LN_PDRB	0.805348	0.304001	2.649162	0.0129
LN_BD	0.190291	0.103789	1.833438	0.0770
LN_IPM	-3.390829	3.450441	-0.982723	0.3339
LN_TPAK	-0.322810	0.428283	-0.753730	0.4571

Sumber: Eviews 12 (data diolah), 2025

Melalui hasil perhitungan dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LN_PAJAK}_{it} = 14.08235C + 0.805348\text{LN_PDRB}_{it} + 0.190291\text{LN_BD}_{it} - 3.390829\text{LN_IPM}_{it} - 0.322810\text{LN_TPAK}_{it} + e_{it}$$

Dari hasil estimasi dengan menggunakan *Fixed Effect Model* dapat dijelaskan bahwa masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi memiliki nilai intersep yang berbeda-beda, berikut ini nilai intersep Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi:

Tabel 5. 9 Hasil Nilai Intersep Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Variable	Coefficient
KERINCI--C	-0.184952
MERANGIN--C	-0.088507
SAROLANGUN--C	-0.346056
BATANGHARI--C	-0.204780
MUAROJAMBI--C	0.409248
TANJUNGPABUNGTIMUR--C	-0.624854
TANJUNGPABUNGBARAT--C	-0.746674
TEBO--C	-0.253133
BUNGO--C	0.278020
KOTAJAMBI--C	2.053182
KOTASUNGAIPENUH--C	-0.291496

Sumber: *Eviews 12 (data diolah), 2025*

Melalui hasil regresi dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM) maka diperoleh nilai intersep setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi seperti berikut:

1. Kabupaten Kerinci

$$\text{LN_PAJAK}_{\text{Kerinci},it} = -0.184952 + 0.805348\text{LN_PDRB}_{it} + 0.190291\text{LN_BD}_{it} - 3.390829\text{LN_IPM}_{it} - 0.322810\text{LN_TPAK}_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Belanja Daerah, IPM, PDRB dan TPAK baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten kerinci berpengaruh secara individual pada Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar - 0.184952 persen.

2. Kabupaten Merangin

$$\text{LN_PAJAK}_{\text{Merangin},it} = -0.088507 + 0.805348\text{LN_PDRB}_{it} + 0.190291\text{LN_BD}_{it} - 3.390829\text{LN_IPM}_{it} - 0.322810\text{LN_TPAK}_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Belanja Daerah, IPM, PDRB dan TPAK baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Merangin berpengaruh secara individual pada Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar - 0.088507 persen.

3. Kabupaten Sarolangun

$$LN_PAJAKSarolangun_{it} = -0.346056 + 0.805348LN_PDRB_{it} + 0.190291LN_BD_{it} - 3.390829LN_IPM_{it} - 0.322810LN_TPAK_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Belanja Daerah, IPM, PDRB dan TPAK baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Merangin berpengaruh secara individual pada Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar - 0.346056 persen.

4. Kabupaten Batang Hari

$$LN_PAJAKBatanghari_{it} = -0.204780 + 0.190291LN_BD_{it} + - 3.390829LN_IPM_{it} + 0.805348LN_PDRB_{it} + -0.322810LN_TPAK_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Belanja Daerah, IPM, PDRB dan TPAK baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Merangin berpengaruh secara individual pada Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar - 0.204780 persen.

5. Kabupaten Muaro Jambi

$$LN_PAJAKMuaroJambi_{it} = 0.409248 + 0.805348LN_PDRB_{it} + 0.190291LN_BD_{it} - 3.390829LN_IPM_{it} - 0.322810LN_TPAK_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Belanja Daerah, IPM, PDRB dan TPAK baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Merangin berpengaruh secara individual pada Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar 0.409248 persen.

6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

$$LN_PAJAKTanjabt_{it} = -0.624854 + 0.805348LN_PDRB_{it} + 0.190291LN_BD_{it} - 3.390829LN_IPM_{it} - 0.322810LN_TPAK_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Belanja Daerah, IPM, PDRB dan TPAK baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Merangin berpengaruh secara

individual pada Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar - 0.624854 persen.

7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

$$LN_PAJAKTanjabbar_{it} = -0.746674 + 0.805348LN_PDRB_{it} + 0.190291LN_BD_{it} - 3.390829LN_IPM_{it} - 0.322810LN_TPAK_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Belanja Daerah, IPM, PDRB dan TPAK baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Merangin berpengaruh secara individual pada Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar - 0.746674 persen.

8. Kabupaten Tebo

$$LN_PAJAKTebo_{it} = -0.253133 + 0.805348LN_PDRB_{it} + 0.190291LN_BD_{it} - 3.390829LN_IPM_{it} - 0.322810LN_TPAK_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Belanja Daerah, IPM, PDRB dan TPAK baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Merangin berpengaruh secara individual pada Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar - 0.253133 persen.

9. Kabupaten Bungo

$$LN_PAJAKBungo_{it} = 0.278020 + 0.805348LN_PDRB_{it} + 0.190291LN_BD_{it} - 3.390829LN_IPM_{it} - 0.322810LN_TPAK_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Belanja Daerah, IPM, PDRB dan TPAK baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Merangin berpengaruh secara individual pada Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar 0.278020 persen.

10. Kota Jambi

$$LN_PAJAKKotaJambi_{it} = 2.053182 + 0.805348LN_PDRB_{it} + 0.190291LN_BD_{it} - 3.390829LN_IPM_{it} - 0.322810LN_TPAK_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Belanja Daerah, IPM, PDRB dan TPAK baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Merangin berpengaruh secara individual pada Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar 2.053182 persen.

11. Kota Sungai Penuh

$$\text{LN_PAJAKSungaiPenuh}_{it} = -0.291496 + 0.805348\text{LN_PDRB}_{it} + 0.190291\text{LN_BD}_{it} - 3.390829\text{LN_IPM}_{it} - 0.322810\text{LN_TPAK}_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Belanja Daerah, IPM, PDRB dan TPAK baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Merangin berpengaruh secara individual pada Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar - 0.291496 persen.

5.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memverifikasi kecocokan model regresi yang digunakan dalam penelitian sebagai alat analisis. Pada regresi data panel, uji asumsi klasik meliputi uji linieritas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Namun, menurut Basuki dan Prawoto (2015), tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan secara wajib untuk setiap regresi linear yang menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS).

Pada model terpilih, yaitu *Fixed Effect Model*, dilakukan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas dilakukan ketika terdapat beberapa variabel independen yang digunakan dalam regresi linier, karena multikolinearitas tidak dapat terjadi jika hanya ada satu variabel bebas. Sedangkan, masalah heteroskedastisitas umumnya terjadi pada data *cross-sectional*, dan data panel memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan data *cross-sectional* daripada data *time series*, sehingga pengujian heteroskedastisitas perlu dilakukan. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini.

1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel bebas yang digunakan dalam model regresi. Berdasarkan uji multikolinearitas dalam penelitian ini diperoleh sebagai berikut:

Tabel 5. 10 Hasil Uji Multikolinearistas

	LN_PDRB	LN_BD	LN_IPM	LN_TPAK
LN_PDRB	1.000000	0.796595	-0.084501	0.005564
LN_BD	0.796595	1.000000	0.132804	0.041828
LN_IPM	-0.084501	0.132804	1.000000	-0.364332
LN_TPAK	0.005564	0.041828	-0.364332	1.000000

Sumber: Eviews 12 (data diolah), 2025

Melalui hasil output ini dapat diamati bahwasanya nilai koefisien Dari PDRB dan IPM sebesar $-0.084501 < 0,85$. PDRB dan TPAK sebesar $0.005564 < 0,85$. Dan Belanja Daerah dan TPAK sebesar $0.041828 < 0,85$. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos Uji Multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya ketidaksamaan varians dari semua yang diteliti, adapun hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 5. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.646818	0.805999	-0.802504	0.4288
LN_PDRB	0.024301	0.023543	1.032223	0.3105
LN_BD	-0.009847	0.008038	-1.225037	0.2304
LN_IPM	0.103148	0.267212	0.386015	0.7023
LN_TPAK	-0.033002	0.033168	-0.994999	0.3280

Sumber: Eviews 12 (data diolah), 2025

Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diamati bahwa nilai probabilitas untuk setiap variabel independen memiliki nilai yang lebih besar dari 0,10 Sesuai dengan kriteria pengujian, ini menunjukkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas yang signifikan antara variabel-variabel tersebut.

5.2.4 Uji Hipotesis

1. Uji F

Uji f dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh variabel PDRB, Belanja Daerah, IPM dan TPAK terhadap Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi secara bersama-sama atau secara simultan. Uji f dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,10 (10%).

Tabel 5. 12 Hasil Uji F-Statistik Pada Metode FEM

F-Statistic	Prob (F-Statistic)
277.7630	0.000000

Sumber: Eviews 12 (data diolah), 2025

Berdasarkan tabel maka dapat diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 277.7630 dengan nilai probabilitas $0.000000 < 0,10$ (10%). Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel PDRB, Belanja Daerah, IPM dan TPAK bersama-sama berpengaruh signifikan Pajak Daerah.

2. Uji t

Untuk menguji signifikan pengaruh PDRB, Belanja Daerah, IPM dan TPAK terhadap Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi secara parsial maka digunakan Uji t statistik. Digunakannya Uji t yaitu untuk melihat besaran pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan tingkat signifikansi 0,10 (10%). Berdasarkan output Eviews 12 maka diperoleh hasil berikut:

Tabel 5. 13 Nilai t-Statistik pada Metode FEM

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.	keterangan
PDRB	0.805348	2.649162	0.0129	Signifikan
BD	0.190291	1.833438	0.0770	Signifikan
IPM	-3.390829	-0.982723	0.3339	Tidak Signifikan
TPAK	-0.322810	-0.753730	0.4571	Tidak Signifikan

Sumber: Eviews 12 (data diolah), 2025

Berdasarkan hasil uji t pada tabel maka untuk melihat secara rinci hasil setiap variabel secara parsial dapat diketahui hasil regresi menunjukkan bahwa nilai *Tax Buoyancy* direpresentasikan oleh koefisien dari variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang sebesar 0,805348 dan signifikan pada tingkat signifikansi 10% dengan t-Statistic 2.649162 dan nilai probabilitas 0,0129. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak sebesar 0,81%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama yang mempengaruhi Pajak Daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Iskandar et al., (2021) bahwa nilai koefisien sebesar 0,86% yang menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang diterapkan dapat meningkatkan tingkat *tax buoyancy* pajak daerah sebesar 0,86 terhadap kenaikan PDRB.

Dari tiga variabel kontrol yang diuji, hanya variabel Belanja Daerah yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah, dengan t-Statistic sebesar 1.833438 dan probabilitas 0,0770 yang signifikan pada tingkat 10%. Ini berarti bahwa peningkatan belanja daerah berpotensi mendorong peningkatan penerimaan pajak, karena efek pengeluaran pemerintah daerah yang merangsang aktivitas ekonomi di wilayah kabupaten/kota provinsi jambi.

Sementara itu, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah, dengan nilai probabilitas sebesar 0,3339. Hal ini dapat dijelaskan karena IPM lebih mencerminkan pembangunan jangka panjang yang tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Demikian pula, variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak signifikan dengan probabilitas 0,4571, yang menandakan bahwa tingkat partisipasi kerja yang tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak, karena banyaknya pekerja yang beraktivitas di sektor informal yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan.

3. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi *Adjusted R-Square* adalah uji yang memperlihatkan besaran kontribusi dari variabel – variabel independen yang digunakan pada variabel dependen. Ukuran dari uji ini terdiri dari 0 sampai 1. Nilai ini mengindikasikan tingkat koefisien determinasi yang mendekati angka 0 merepresentasikan bahwa kecilnya kontribusi dari variabel – variabel bebas pada variabel terikat sedangkan bilamana nilai mendekati angka 1 mempresentasikan pengaruh yang cukup besar. Berikut ini hasil dari Koefisien determinasi *Adjusted R-Square* :

Tabel 5. 14 Hasil Uji R-squared Pada Metode FEM

R-squared	0.992598
Adjusted R-squared	0.989024

Sumber: Output Eviews 12 (diolah)

Dari hasil output eviws dihasilkan koefisien determinan (R^2) adalah sebesar 0.989024. Hal ini mengindikasikan bahwasanya senilai 0.989024 persen

variabel Pajak Daerah ditentukan oleh variabel PDRB, Belanja Daerah, IPM dan TPAK. Sedangkan 2 persen lainnya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian.

5.3 Hasil Pembahasan

Berdasarkan olahan data yang telah dilakukan sebelumnya, maka dipeoleh hasil estimasi dengan menggunakan *Fixed Effect Model* untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap pajak (*Tax Buoyancy*) dengan kontrol variabel Belanja Daerah, IPM dan TPAK Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2021 – 2024. Berikut adalah hasil interpretasi dan pembahasannya:

5.3.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pajak Daerah (*Tax Buoyancy*)

Nilai koefisien PDRB menunjukkan bahwa nilai *Tax Buoyancy* direpresentasikan oleh koefisien dari variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang sebesar 0.805348. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak sebesar 0,81%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama yang mempengaruhi Pajak Daerah.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Iskandar et al., (2021) bahwa nilai koefisien sebesar 0,86% yang menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang diterapkan dapat meningkatkan tingkat *tax buoyancy* pajak daerah sebesar 0,86 terhadap kenaikan PDRB. Kemudian penelitian yang dilakukan Balqis & Miksalmina, (2022) Hasil analisis menunjukkan respon bersifat elastis yaitu 1,72. Artinya perubahan penerimaan pajak lebih besar dari pada perubahan produk domestik bruto. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Praningrum & Khoirudin, (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

5.3.2 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pajak Daerah

Belanja Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Dengan nilai probabilitas t-statistic lebih kecil dari alfa ($\alpha=10\%$) yaitu sebesar $0.0770 < 0,10$ maka H_0 ditolak dan H_a di terima. Nilai koefisien Belanja Daerah senilai 0.190291 hal ini menandakan

apabila Belanja Daerah meningkat 1 miliar rupiah maka Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi meningkat senilai 0.190291 persen.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Pratiwi (2021) menyatakan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten/Kota Jawa Timur. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Saniah & Murtala, (2024) Hasil analisis mengungkapkan bahwa belanja daerah membawa dampak positif yang signifikan pada penerimaan pajak daerah.

5.3.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pajak Daerah

IPM tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Dengan nilai probabilitas t-statistic lebih besar dari alfa ($\alpha=10\%$) yaitu sebesar $0.3339 > 0,10$ maka H_a ditolak dan H_o di terima. Nilai koefisien IPM senilai -3.390829 hal ini menandakan apabila IPM meningkat 1 persen, maka Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi nantinya menurun senilai -3.390829 persen.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Praningrum & Khoirudin (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

5.3.4 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Pajak Daerah

TPAK tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Dengan nilai probabilitas t-statistic lebih besar dari alfa ($\alpha=10\%$) yaitu sebesar $0.4571 > 0,10$ maka H_a ditolak dan H_o di terima. Nilai koefisien TPAK senilai -0.322810 hal ini menandakan apabila TPAK meningkat 1 persen, maka Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi nantinya menurun senilai -0.322810 persen. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gautama (2024) hasilnya menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan dampak negatif terhadap pendapatan pajak di Provinsi Jawa Tengah.

5.4 Implikasi Kebijakan Hasil Penelitian

5.4.1 Implikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, yang berarti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin besar potensi penerimaan pajaknya, sehingga pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, peningkatan PDRB yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah perlu menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah daerah seharusnya mendorong investasi, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta diversifikasi sektor ekonomi untuk memperkuat perekonomian lokal. Dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan pajak daerah diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Selanjutnya, pemerintah daerah juga perlu menerapkan sistem digitalisasi perpajakan atau *e-taxation* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan pajak daerah. Sistem ini dapat terintegrasi dengan data sektoral PDRB agar pemerintah memiliki informasi yang lebih akurat dalam menentukan potensi dan strategi fiskal. Kebijakan ini juga sejalan dengan arah RPJMD Provinsi Jambi yang menekankan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, khususnya dalam misi meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat perekonomian berbasis potensi lokal, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, integrasi antara pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB dan kebijakan fiskal melalui peningkatan pajak daerah akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.

5.4.2 Implikasi Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah yang dikelola dengan baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Provinsi Jambi perlu lebih

mengoptimalkan alokasi dan pengelolaan belanja daerah, khususnya yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan. Belanja daerah yang fokus pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal dapat menstimulus aktivitas ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan basis penerimaan pajak daerah. Sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, terdapat beberapa kebijakan strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah. Pertama, meningkatkan belanja untuk pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, dan pasar rakyat guna mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa. Kedua, mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, modal usaha, dan kemitraan, agar sektor ini tumbuh menjadi kontributor pajak yang signifikan. Ketiga, mendorong digitalisasi dan transparansi anggaran melalui penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengarahkan dana transfer dari pusat seperti DAU dan DAK untuk membiayai program yang berdampak langsung pada peningkatan potensi penerimaan pajak lokal. Kemudian, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi kinerja belanja berbasis *output* dan *outcome*, dengan indikator yang mengukur kontribusi belanja terhadap peningkatan PAD. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah daerah di Provinsi Jambi dapat meningkatkan efektivitas belanja publik sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak daerah, memperkuat kemandirian fiskal, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan sebagaimana diarahkan dalam RPJMD Provinsi Jambi.

5.4.3 Implikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi. Artinya, meskipun kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat meningkat, hal tersebut belum secara langsung mendorong peningkatan pajak daerah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh

belum optimalnya keterkaitan antara peningkatan IPM dengan pertumbuhan sektor ekonomi formal yang menjadi sumber penerimaan pajak. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya integrasi lebih kuat antara pembangunan manusia dan pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah daerah perlu mendorong agar peningkatan IPM juga berdampak pada produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat yang bisa menjadi objek pajak. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM, serta keterlibatan masyarakat dalam sektor usaha produktif. Sejalan dengan RPJMD Provinsi Jambi yang menargetkan peningkatan kemandirian fiskal dan kualitas SDM, beberapa kebijakan yang dapat diterapkan antara lain: (1) menyusun program pelatihan kerja berbasis potensi lokal, (2) mengintegrasikan pendidikan dan dunia usaha, (3) memperluas kesempatan kerja berbasis kewirausahaan, dan (4) meningkatkan literasi pajak masyarakat. Dengan strategi ini, peningkatan IPM diharapkan tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

5.4.4 Implikasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi. Meskipun tingkat partisipasi tenaga kerja cukup tinggi, hal ini belum berdampak langsung terhadap peningkatan pajak daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar angkatan kerja mungkin masih terserap di sektor informal atau kegiatan ekonomi non-produktif yang belum tercatat sebagai basis penerimaan pajak daerah. Pemerintah daerah perlu mengarahkan strategi pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya pada peningkatan jumlah angkatan kerja yang aktif, tetapi juga pada peningkatan kualitas, produktivitas, dan keterlibatan mereka dalam sektor ekonomi formal yang menjadi sumber utama pajak daerah. Tanpa transformasi angkatan kerja menuju sektor formal dan produktif, maka kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak akan tetap terbatas. Sebagai upaya perbaikan, pemerintah daerah perlu memperkuat program pelatihan kerja berbasis kompetensi dan kebutuhan dunia usaha lokal. Selain itu, dibutuhkan langkah-

langkah konkret untuk mendorong pelaku usaha di sektor informal agar dapat masuk ke dalam sektor formal melalui kemudahan perizinan, pendampingan usaha, dan insentif fiskal. Edukasi perpajakan juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat usia kerja agar memahami kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi pembangunan daerah. Sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, kebijakan ini mendukung misi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, dan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan strategi peningkatan PAD. Langkah-langkah seperti mendorong sinergi antara pendidikan vokasi dan dunia kerja, pemanfaatan data TPAK untuk pemetaan potensi wajib pajak, serta pemberdayaan UMKM formal merupakan bagian dari solusi yang dapat diimplementasikan. Dengan demikian, meskipun TPAK belum berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah saat ini, melalui kebijakan yang tepat, tenaga kerja di Provinsi Jambi dapat diarahkan untuk menjadi motor penggerak ekonomi formal dan turut memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan ruang yang cukup besar bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Peneliti dapat mempertimbangkan variabel lain yang mungkin berpengaruh, seperti tingkat urbanisasi, investasi daerah, tingkat kepatuhan pajak, efektivitas sistem administrasi pajak, atau kebijakan insentif fiskal. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed-method*) untuk menggali secara mendalam hubungan antara variabel pembangunan sosial dan penerimaan pajak daerah, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan hambatan dalam peningkatan penerimaan pajak daerah.